

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI PENGUATAN
KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PEMASARAN PRODUK OLAHAN
HASIL PERTANIAN**

Imam Santosa ¹⁾

¹⁾Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Jenderal Soedirman
University, Purwokerto, Central Java
E-mail: Scokronegoro@yahoo.com

ABSTRACT

This research is aimed to formulate empowering local institutions that support the development of marketing by processing products of agricultural product. Research design uses a combination of qualitative and quantitative approaches with a more dominant qualitative way. This research is located in Baturaden Subdistrict, Banyumas Regency and Karangreja District, Purbalingga Regency. Both are in Central Java Province. Based on the research's results revealed, that the design mechanism strengthening local institutions in the marketing of processed agricultural products. Access to technology transfer is an important part. Another element of support in the form of clear linkage between farmers and agro-tourism market managers, while accessibility of price information from processed products is also an essential factor. Another strengthening factor is achieved by strengthening the social relations with a pattern of reciprocity especially in partnership

Key Words : *community empowerment, local institutions, marketing of processed product.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Pedesaan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat melalui pengidentifikasian kebutuhan dan pemecahan masalah bersama (Adisasmito, 2006). Pembangunan pedesaan dapat pula diartikan sebagai perubahan terencana yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik berdasarkan norma dan nilai tertentu yang disepakati oleh komunitas setempat. Dengan begitu maka pembangunan pedesaan merupakan perubahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri melalui pemecahan bersama menuju taraf hidup yang lebih baik (Santosa, 2018). Sejarah panjang pembangunan pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa keinginan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi telah mengabaikan sektor pembangunan lainnya, sehingga sedikit banyak mengganggu percepatan pembangunan yang indikatornya ditunjukkan masih lemahnya *human development index* di tingkat maupun nasional yang masih dinilai rendah.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya capaian pembangunan kita di tingkat dunia dalam soal kualitas sumberdaya manusia. Dalam HDI memang capaian GNP merupakan salah satu indikator, namun itu bukan satu-satunya Indikator yang penting. Indikator lain yang tak kalah penting yaitu angka harapan hidup dan lama pendidikan.

¹Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang The 8th The University Research Colloquium di Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tanggal 8 September 2018.

²Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan dan Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Tentu sebuah negara dengan capaian ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis HDI yang paling tinggi. Tentunya hal ini menyangkut sumberdaya manusia di sektor pertanian. Dalam kenyataannya kebanyakan negara mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga paradigma pertumbuhan relatif dominan. Paradigma ini memandang bahwa pemberdayaan nasional dapat dicapai melalui *economic growth* setinggi-tingginya. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai fungsi dari *saving ratio*, *capital-out put ratio* dan strategi investasi. Akibatnya banyak sektor lain yang kedodoran

termasuk di dalamnya aspek distribusi dan pemerataan, aspek keadilan sosial dan sisi kemusiaan lainnya yang terkendala akibat keinginan mengejar pertumbuhan ekonomi.

Pembangunanisme menjadi semakin menggejala dalam pertumbuhan global, namun aspek pemberdayaan masyarakat yang lemah menjadi terabaikan. Munculnya degradasi ekologis, polarisasi sosial dan tingginya pengangguran di negara-negara dunia ketiga menimbulkan tumbuhnya umat manusia untuk peduli kepada sesamanya. Beberapa kekawatiran konferensi di Roma menunjukkan bahwa Bumi telah mencapai ambang batas pertumbuhan (*thresh-old*) dan akan terjadi kehancuran planet bumi. Paling tidak efek negatif dari pertumbuhan ekonomi ada tiga, yaitu : (1) menurunkan derajat pertumbuhan, (2) mengabaikan pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas, (3) dependensi yang terus menerus dengan faktor luar yang terus meningkat. Sisi lain yang kurang mendapatkan perhatian yaitu mewadahi partisipasi masyarakat dan menguatkan tumbuhnya kelembagaan lokal sehingga introduksi pembangunan oleh orang luar tidak merusak cita-cita pembangunan dari masyarakat lokal.

Inovasi yang digalakkan juga seringkali terkendali oleh mental risk averse (Geertz, 1980), namun untuk kawasan petani sayuran dataran itu teori Geertz (1980) layak dipertanyakan. Salah satu strategi yang berpotensi untuk menstimulus pemberdayaan masyarakat adalah memanfaatkan fungsi kelembagaan lokal non formal yang berbasis komunitas. Nugroho (2005) menjelaskan kelembagaan lokal memang relevan untuk dimanfaatkan sebagai struktur mediasi yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat. Eksistensi kelembagaan lokal sering hanya dijadikan sebagai instrumen perpanjangan kekuasaan jenjang desa yang cenderung mendukung program pembangunan yang berorientasi ke atas. Sebagai konsekuensi, kelembagaan lokal menjadi kurang berfungsi sebagai media penyaluran aspirasi warga karena mengalami delegitimasi. Satu hal penting yang diingatkan oleh Eneji, et.al (2012) dan Rogers, (1995) yaitu adopsi inovasi yang lebih menyentuh untuk kawasan wisata. Kondisi yang memprihatinkan ini tentu perlu diperhatikan secara serius melalui pelaksanaan suatu kajian yang lebih mendalam agar dihasilkan suatu upaya yang strategis untuk memanfaatkan kembali fungsi dan kapasitas penting kelembagaan lokal bagi pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan

Bagaimana permasalahan dan solusi agar terjadi penguatan kelembagaan lokal di sektor pemasaran produk olahan hasil pertanian agar menjadi wahana bagi tercapainya pemberdayaan masyarakat petani miskin di pedesaan? Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan kepapaan ditinjau dari penguatan sektor pemasaran produk olahan hasil pertanian yang nantinya bisa mendukung pemberdayaan masyarakat petani di kawasan penelitian.

METODE

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja di kawasan wisata agro di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Lokasi penelitian. Mereka bekerja di sektor pertanian di Pedesaan. Penelitian ini dirancang berdasarkan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis data sekunder. Populasi penelitian akan mencakup seluruh rumah tangga yang tinggal di sekitar lokasi penelitian. Sumber data responden diambil dengan teknik purposive yang memenuhi kriteria sebagai petani yang pertama kali menerapkan agribisnis pertanian campuran. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan tabulasi statistik sederhana, skoring, dan persentase. Data kualitatif dapat dianalisis dengan analisis data interaktif (Mile dan Huberman, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dan Solusi Penguatan Kelembagaan Lokal

Penguatan kelembagaan lokal untuk pemberdayaan masyarakat desa di Karangreja dan Baturaden melalui pengelolaan usaha produktif mix farming ternyata menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat internal dan eksternal. Beberapa permasalahan yang dijelaskan informan memiliki dampak serius seringkali merintang saat dilaksanakan penguatan kelembagaan lokal oleh pengelola bersama warga anggota. Beberapa permasalahan internal yang muncul dalam penguatan kelembagaan produk olahan, antara lain : (1) jejaring kemitraan yang lemah, (2) frekuensi interaksi sosial anggota kelembagaan lokal yang masih jarang, (3) mekanisme kelembagaan terlampaui luas dan bercampur-baur dan (4) difusi teknologi yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasar masih lemah. Adapun ditinjau dari sisi eksternalnya ditemukan beberapa kendala, antara lain : (1) keterbatasan layanan informasi pasar, (2) keterbatasan pelayanan tentang informasi harga, dan (3) rantai tata niaga relatif panjang. Kesemua permasalahan yang terinci pada Gambar 8 secara bersama mengurangi kemampuan kelembagaan lokal dalam mengembangkan pemasaran produk olahan usaha mix farming. Dampak yang ditimbulkan oleh ragam permasalahan penguatan kelembagaan lokal tidak sama untuk setiap kesempatan. Tingkat dampak yang ditimbulkan juga berbeda antar permasalahan. Produsen pangan olahan usaha mix farming yang menjadi informan penelitian di Karangreja dan Baturaden mengakui bahwa tingkat kekuatan dampak yang paling parah bersumber dari permasalahan keterbatasan fasilitas pelayanan informasi baik pasar (9,5), modal produksi (9,2) dan harga (9,0).

Bagi informan, ketiga informasi tersebut sangat vital disiapkan kelembagaan lokal ketika berfungsi sebagai mediator pengembangan pemasaran produk olahan usaha mix farming. Tanpa kesiapan fasilitas pelayanan informasi pasar, harga dan modal produksi maka informan tetap kesulitan melakukan pemasaran produk yang dihasilkan. Jenis kelembagaan lokal dengan skala prioritas fungsi non dominan rentan terhadap permasalahan dengan tingkat kekuatan dampak parah. Permasalahan lain yang menimbulkan tingkat kekuatan dampak sedang yakni mekanisme kerja kelembagaan lokal yang terlalu luas dan cenderung campur baur (8,4). Permasalahan terkait jejaring kemitraan antara kelembagaan lokal dengan berbagai pihak pengelola pasar potensial juga menimbulkan dampak dalam kategori sedang (8,2). Demikian rantai tataniaga yang ditanggung produsen produk olahan usaha mix farming termasuk permasalahan berdampak sedang. Ketiga permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian serius ketika dilaksanakan penguatan kelembagaan lokal. Selama ini, beberapa jenis kelembagaan lokal difungsikan warga untuk berbagai kepentingan sehingga kurang terfokus pada pengembangan pemasaran produk olahan usaha mix farming. Hanya beberapa kali kegiatan kelembagaan lokal diorientasikan untuk membantu pemasaran produk informan.

Ketiga permasalahan dengan tingkat kekuatan dampak sedang rawan ditemukan pada jenis kelembagaan lokal dengan skala prioritas fungsi yang sebagian dominan dan non dominan. Sebagian lain permasalahan penguatan kelembagaan lokal memiliki tingkat kekuatan dampak yang rendah terhadap pemasaran produk olahan usaha mix farming. Beberapa permasalahan yang termasuk pada kategori ini ialah: frekuensi pertemuan antar anggota kelembagaan lokal rendah (7,4) dan difusi teknologi lemah (7,2). Kedua permasalahan tersebut relatif lebih mudah diselesaikan informan. Difusi teknologi dapat diakses informan dari beberapa sumber lain misal penyuluh pertanian, agen pembaharu, peneliti, aparatpemerintah daerah, mahasiswa dan sesama prtani produsen produk pangan olahan berbahan hasil usaha mix farming. Berdasarkan pengamatan di lapangan serta hasil wawancara mendalam ditemukan beberapa alternatif solusi agar terjadinya penguatan kelembagaan lokal. Tabel 1 menjelaskan hal yang dimaksud.

Tabel 1. Alternatif Solusi atas Permasalahan Penguatan Kelembagaan Lokal

No.	Ragam Permasalahan	Alternatif Solusi
1.	Keterbatasan fasilitas pelayanan informasi	Pengembangan akses kelembagaan lokal terhadap fasilitas pelayanan informasi pasar. Membina hubungan dengan

	pasar	beberapa segmen asar potensial dengan dukungan pemerintah daerah. Misal: pameran dan pasar wisata
2.	Keterbatasan fasilitas pelayanan informasi harga	Pengembangan akses kelembagaan lokal terhadap fasilitas pelayanan informasi harga melalui pemanfaatan teknologi informasi antara pengelola dengan beberapa segmen pasar potensial didukung oleh pemerintah daerah. Misal: sentral informasi harga yang rutin disiarkan kepada petani produsen produk olahan usaha mix farming
3.	Rantai tataniaga panjang	Mendekatkan jarak pasar kepada petani produsen produk olahan usaha mix farming
4.	Jejaring kemitraan lemah	Membuka dan mengembangkan akses jejaring bisnis oleh kelembagaan lokal terhadap mitra strategis
5.	Frekuensi interaksi sosial anggota kelembagaan lokal masih jarang	Peningkatan intensitas frekuensi interaksi sosial antar anggota kelompok kelembagaan lokal pada kegiatan produktif kreatif inovatif tentang pemasaran produk olahan usaha mix farming
6.	Mekanisme kerja kelembagaan lokal terlalu luas dan bercampur baur	Mekanisme kerja kelembagaan lokal secara terencana dipusatkan pada kegiatan yang terkait pemasaran produk olahan usaha mix farming. Kegiatan ini dikelola secara serius dengan memanfaatkan sumberdaya pengelola yang mumpuni.
7.	Difusi teknologi untuk produk sesuai trend pasar lemah	Peningkatan daya serap inovasi yang sesuai dari berbagai sumber pada kelembagaan lokal agar dapat didifusikan pada warga desa yang menjadi produsen produk olahan usaha mix farming.
8.	Keterbatasan fasilitas pelayanan informasi modal produksi	Pengembangan akses kelembagaan lokal terhadap fasilitas pelayanan informasi modal produksi melalui jaringan hubungan dengan beberapa pihak finansial yang potensial. Sumber finansial yang dimaksud memberlakukan bunga pinjaman yang relatif rendah.

KESIMPULAN

Setelah melalui kajian mendalam dan melalui triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penentu penguatan kelembagaan lokal yaitu keterbukaan jaringan antara petani dengan pengelola pasar agrowisata/lokawisata. Penguatan fungsi kelembagaan juga dapat ditingkatkan melalui aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan informasi harga dan pasar produk pangan olahan sesuai *trend* pasar. Faktor penguat lain yang bisa diharapkan mendorong penguatan kelembagaan lokal yaitu hubungan sosial kemitraan bertipe resiprositas mutualisme. Untuk merealisasikan gagasan-

gagasannya masyarakat petani lokal memerlukan dukungan dari berbagai pihak salah satunya perlunya wadah pelelangan yang lebih fair bagi komoditas hasil pertanian mereka termasuk bahan olahan komoditas pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito, 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Eneji, Mathias Agri, Song Weiping, Oko Sylvannus Ushie. (2012). Benefit of Agricultural Technology Innovation Capacity to Peasant Farmers in Rural Poor Areas: The Case of DBN Group, China. *International Journal of Development and Sustainability*. 1 (2): 145-170

Geertz, Clifford. 1980. Involusi Pertanian. Bhratara Karya Aksara, Jakarta. Ghorbani, M. 2008. The Efficiency of Saffron's Marketing Channel in Iran. *World Applied Sciences Journal* 4(4): 523-527

Nugroho, Heru. 1997. Globalisasi dan tantangan daya saing Indonesia. LIPI Press: Jakarta.

Parma, P.G. 2014. Pengembangan Model Penguatan Lembaga Pertanian Sebagai Prime Mover Pembangunan Kawasan DPP Destinasi Wisata Kintamani. Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3 (1) 380-393

Purwanto, Mat Syukur dan Puji Santoso (2007). Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur. BPTP Malang. Jawa Timur.

Rogers, Everett M (1995). *Diffusion of Innovations*. The Free Press. London

Santosa, Imam dan Agus Suyanto. 2018. The Basic Social Values Which underlies Social Institution of Farmers. *Journal of Art and Humanities*. Vol 7, Issue 1. Canada Toronto.
